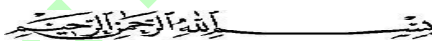




**PUTUSAN**

**Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 25 Oktober 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, Pengacara dan Kosultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat yang beralamat di Jl. Muara Labuh - Padang Aro KM 12 Jorong Ampalu Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 27/SKK/YBH.HM/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 28/K.Kh/2022, tanggal 5 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX 16 November 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Hal. 1 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 5 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML, tertanggal 5 Juli 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok Selatan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2021;
4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 bulan, Sejak awal Oktober 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - 1) Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah, karena Tergugat lebih banyak tidak bekerja daripada bekerja, sehingga uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti kebutuhan dapur lebih banyak orang tua Penggugat yang menanggungnya;
  - 2) Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, seminggu setelah anak lahir Tergugat pergi ke rumah orang tuanya selama 15 hari, sehingga Penggugat ditinggalkannya tanpa biaya dan tanpa merasa ada tanggung jawab;

Hal. 2 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi, sehingga pada tanggal 15 Desember 2021 Tergugat pergi dari rumah dengan alasan pergi bekerja, setelah itu Tergugat langsung pergi ke rumah orang tuanya XXXXX sampai saat ini tidak pernah pulang lagi ke rumah dan tidak juga memberikan nafkah. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang telah berlangsung selama lebih kurang 7 bulan lamanya;
6. Bahwa empat puluh hari setelah itu, Tergugat menelepon Penggugat untuk mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Penggugat tidak bersedia. Lalu Tergugat minta berpisah, Penggugat menyetujui untuk berpisah;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta juga tidak pernah memberikan biaya anak;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah usaha damai tidak pernah dilakukan oleh keluarga;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**Primair:**

Hal. 3 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:** Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat didampingi kuasanya telah hadir in persons di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis (bukti P.)

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak 10 (sepuluh) bulan setelah menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikannafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, sehingga saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun akhirnya tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2021;

Hal. 5 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak setelah lahir anak (setelah 10 bulan pernikahan) kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikannafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, sehingga saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun akhirnya tidak berhasil;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2021;

Hal. 6 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat selanjutnya mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada kuasa Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, Pengacara dan Kosultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat yang beralamat di Jl. Muara Labuh - Padang Aro KM 12 Jorong Ampalu Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 27/SKK/YBH.HM/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 28/K.Kh/2022, tanggal 5 Juli 2022, menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Labuh tempat berperkara. Demikian, Surat Kuasa

Hal. 7 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jjs Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan ....”, dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... 9. gugat perceraian”, maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai para pihak (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Desember 2021 sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah, karena Tergugat lebih banyak tidak bekerja daripada bekerja, sehingga uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti kebutuhan dapur lebih banyak orang tua Penggugat yang menanggungnya, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, seminggu setelah anak lahir Tergugat pergi ke rumah orang tuanya selama 15 hari, sehingga Penggugat ditinggalkannya tanpa biaya dan tanpa merasa ada tanggung jawab, dan sejak 15 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian dan untuk menghindari perceraian tanpa alasan, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P. yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P. merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, berupa Buku Kutipan Akta Nikah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH-

Hal. 10 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per. Dengan demikian alat bukti P. itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, bukti P. tersebut memuat keterangan yang berisikan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Hal mana menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH-Per. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2, Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dialami sendiri/dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dialami sendiri/dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal. 11 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal Desember 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah, karena Tergugat lebih banyak tidak bekerja daripada bekerja, sehingga uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 15 Desember 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun akhirnya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal Desember 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak 15 Desember

Hal. 12 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Hal mana alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 *jis.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang dapat mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan

Hal. 13 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya fakta sejak 15 Desember 2021 sudah berpisah tempat tinggal secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rasa saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang baik dan harmonis, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, di mana pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau. Hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ada kepedulian terhadap Penggugat selaku istri yang sah dan tidak dapat mengayomi Penggugat dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 dan 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil serta tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Padahal menolak kemudharatan lebih baik dari mengambil manfaat, sebagaimana kaidah fikih menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Hal. 14 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Memimbang, bahwa apa yang didalikan Penggugat dalam surat gugatannya tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak 15 Desember 2021 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML



Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dengan Tergugat bukan ikrar dari suami sebagaimana maksud Pasal 117 Kompilasi hukum Islam akan tetapi atas dasar tuntutan istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka menurut ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Talak tersebut merupakan Bain Shughra, maka Penggugat tidak dapat dirujuk oleh Tergugat (suaminya) meskipun dalam masa iddah, kecuali dengan nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (*lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Haris Luthfi, S.H.I., M.A, sebagai Ketua Majelis serta Koidin, S.H.I., M.H, dan Rizki Elia, S.H.I, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu

*Hal. 16 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Etmajuita, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Koidin, S.H.I., M.H**

**Haris Luthfi, S.H.I., M.A,**

Hakim Anggota II,

**Rizki Elia, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Etmajuita, BA**

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNB	:	
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	Rp.	150.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.ML